

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang wajib dilaksanakan. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya terhadap publik. Pada dasarnya pemerintah daerah berupaya menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Pramudiarta, 2015)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan keuangan di katakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat karakteristik. Pertama, dapat dipahami yaitu laporan keuangan dapat disajikan dengan baik dan sesuai standar agar pemakai informasi laporan keuangan tersebut bisa dengan mudah memahami laporan keuangan tersebut. Kedua, relevan yaitu laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, yaitu dengan cara dapat berguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu. Ketiga, keandalan yaitu informasi

memiliki keandalan jika tidak memiliki atau bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan penyajiannya dengan tulus atau jujur. Keempat, dapat dibandingkan yaitu pemakai laporan keuangan harus bisa membandingkan laporan keuangan perusahaan antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

Komponen laporan keuangan yang disampaikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pengawasan Keuangan (BPK) yang mana sebagai auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan pemerintah guna untuk mengetahui tingkat kualitas informasi yang dimiliki oleh LKPD tersebut. Selain penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, kualitas sistem pengendalian internal, bukti-bukti yang memadai dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan yang nantinya akan menjadi pertimbangan di dalam pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Komisi I DPRD Kota Tegal meminta agar Pemerintahan Kota Tegal untuk segera mendefinitifkan para pejabat Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Tegal. Banyaknya Pelaksana Tugas di lingkungan Pemerintahan Kota apalagi ada yang Pelaksana Tugas merangkap lebih dari satu jabatan, kondisi tersebut membuat kinerja tidak maksimal (www.dprd-tegalkota.go.id).

Sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Tegal dinilai masih amburadul, hal itu ditandai dengan adanya 12 catatan penilaian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam naskah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas sistem pengendalian intern (www.dprd-tegalkota.go.id).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern (Rahmadani, 2015). Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang berlatar belakang pendidikan dibidang akuntansi maka penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Armel, 2017). Sehingga semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Rahmadani (2015) dalam penelitian menyebutkan kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan

daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah studi pada SKPD Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Manfaat dari penggunaan teknologi informasi ini yaitu mempercepat proses transaksi, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar kemampuan multiprosecing (Armel, 2017). Sehingga semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Pamungkas (2017). dalam penelitian menyebutkan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah studi pada DPPKAD Kabupaten Boyolali. Hasil penelitiannya menunjukkan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, adanya pengendalian intern berfungsi untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem pengendalian intern akuntansi yang baik, resiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan

atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan (Armel, 2017). Sehingga semakin baik sistem pengendalian intern maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Utama (2017) dalam penelitian menyebutkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah studi pada SKPD Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitiannya menunjukkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK perwakilan provinsi Jawa Tengah dapat diketahui bahwa hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tegal meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sejak tahun 2012-2016 (www.bpk.go.id).

Penelitian dari Kalumata (2017) yang berjudul pengaruh kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, reviu laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah provinsi sulawesi utara. Hasil menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, reviu laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian dari Yensi (2014) pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). Hasil menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian dari Yuliani (2016) faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Pamungkas (2017). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada penambahan variabel sistem pengendalian intern yang menurut peneliti terdapat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tegal. Alasan peneliti mereplikasi pada penelitian Pamungkas (2017) adalah ingin mengetahui faktor-faktor penyebab Kota Tegal masih meraih

WDP apakah dari faktor kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian intern .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut :

- a. Untuk menemukan bukti empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- b. Untuk menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

- c. Untuk menemukan bukti empiris bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, wawasan mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dari hasil penelitian bisa dijadikan referensi dan sebagai bahan acuan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diteliti pada penelitian ini.

- c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dan meningkatkan pengetahuan untuk pengembangan penelitian berikutnya tentang sektor publik, khususnya menganalisis lebih dalam mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia,

pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern.

